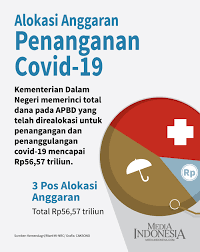
**Selewengkan Dana COVID-19, Kapolri: Polri Tak Pernah Ragu Untuk “Sikat” Dan Memproses Pidana**

****

https://www.google.com/search

Jakarta (Inside Lombok) – Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menegaskan Polri siap menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo untuk menindak tegas pihak-pihak yang berani menyelewengkan dana yang digelontorkan Pemerintah untuk membantu perekonomian warga di tengah pandemik COVID-19.

“Ya, dalam situasi pandemik seperti ini apabila ada yang menyalahgunakan, maka Polri tidak pernah ragu untuk ‘sikat’ dan memroses pidana,” kata Jenderal Idham di Jakarta, Senin.

Hal itu dikatakannya menyusul permintaan Presiden Jokowi kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas oknum pejabat yang nekat melakukan tindak pidana korupsi di tengah pandemik Corona. Presiden Jokowi tidak ingin anggaran penanganan COVID-19 sebesar Rp677,2 triliun disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kapolri Idham mengatakan bahwa Korps Bhayangkara telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang dipimpin Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo. Tim tersebut akan menindak oknum yang menyalahgunakan dana yang dikhususkan bagi rakyat itu. “Polri sudah membentuk satgas khusus di bawah kendali Kabareskrim Polri,” ujar jenderal bintang empat ini.

Idham pun memperingatkan semua pihak agar tidak menyalahgunakan prosedur pencairan dana penanganan COVID-19 dengan tujuan memperkaya diri. “Presiden sudah mempermudah proses pencairan dana COVID-19. Awas, siapa saja yang ingin bermain curang, akan saya sikat! Hukumannya sangat berat,” ujar mantan Kapolda Metro Jaya ini menegaskan. (Ant)

**Catatan**

Penganggaran dan pengalokasian serta pertanggungjawaban penggunaan Dana Penanggulang Dana Covid 19 atau yang dikenal dengan Corona Virus Disease 19 dilaksanakan melalu payung hukum UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetarapan Perpu. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Salah satu ruang lingkup yang diatur dalam UU ini adalah untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka:

1. penanganan pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID- l9) dan/atau
2. menghadapi a.ncaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.[[1]](#footnote-1)

Lebih lanjut terkait jika terjadi penyalahgunaan atas APBN/APBD dalam hal sebagaimana hal tersebut diatas yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian negara atau daerah, dalam Bab Penutup UU ini menyatakahan bahwa

1. Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merrrpakan kerugian negara.[[2]](#footnote-2)
2. Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perrrndangundangan.[[3]](#footnote-3)
3. Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.[[4]](#footnote-4)

**Sumber Berita**

1. https://insidelombok.id/nasional/selewengkan-dana-covid-19-kapolri-polri-tak-pernah-ragu-untuk-sikat-dan-memproses-pidana/16/06/2020;
2. https://mataram.antaranews.com/berita/122960/selewengkan-dana-covid-19-kapolri-polri-tak-pernah-ragu-untuk-sikat-dan-memproses-pidana/26/06/2020;

1. Lihat Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Wrus D/Sease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan [↑](#footnote-ref-1)
2. Lihat Pasal 27 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Wrus D/Sease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan [↑](#footnote-ref-2)
3. Lihat Pasal 27 ayat 2 UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Wrus D/Sease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan [↑](#footnote-ref-3)
4. Lihat Pasal 27 ayat 2 UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Wrus D/Sease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan [↑](#footnote-ref-4)